

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil dan pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang telah disusun terkait dengan pertanyaan rumusan masalah “apa faktor-faktor yang mempengaruhi Italia dalam mengubah kebijakan terhadap pemutusan kerjasama dengan Tiongkok dalam proyek Belt and Road Initiative?”. Pada bab empat ini akan dibagi ke dalam empat bagian sub-bab yang terstruktur, diantaranya sebagai berikut: pertama, membahas sejarah masuknya BRI di Eropa. Kedua, membahas posisi strategis Italia bagi Tiongkok. Ketiga, kebijakan Italia bergabung kedalam kerjasama BRI. Keempat menganalisis kebijakan Italia keluar dari kerjasama BRI dengan menggunakan alat analisis yaitu teori faktor internal dan eksternal milik Snyder sebagai perspektif untuk melihat fenomena yang terjadi, yang kemudian masing-masing teori terdapat sub-bab lagi yang lebih spesifik untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Italia dalam memutuskan untuk keluar dari kerjasama BRI dengan Tiongkok.

A. Sejarah BRI masuk ke wilayah Eropa

Belt and Road Initiative merupakan mega proyek yang diinisiasi oleh presiden Xi Jinping. Proyek ini memiliki dua inisiasi yaitu *21st Century Maritime Silk Road* yang menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, pasifik, dan Afrika melalui jalur Laut atau Maritime berupa pelabuhan dan bendungan. Sedangkan *The Silk Road Economic Belt* menghubungkan Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah melalui jalur darat berupa jalan raya, bandara, terowongan dan kereta api (Chatzky A, 2020). Presiden Xi Jinping dalam melakukan pendekatan BRI ke Eropa dilakukan dengan cara yang bertahap. Pada tahun 2013, Xi Jinping memperkenalkan BRI di wilayah Asia Tengah lebih dulu yaitu di Kazakhstan di Universitas Nazabayev, sebelum luas diperkenalkan ke Wilayah Eropa. Kemudian di tahun 2015 BRI baru diperkenalkan di Wilayah Eropa ketika Xi Jinping melakukan kunjungan resmi ke negara-negara Eropa yaitu Prancis, Jerman, Belgia dan Italia (The Economist, 2019).

Negara-negara Eropa pada saat itu masih dalam keadaan pemulihan dari Krisis keuangan tahun 2008-2009. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga keuangan Tiongkok mulai membanjiri Eropa dengan investasi. Krisis keuangan yang melanda Eropa sejak 2014, bersamaan dengan perubahan kepemimpinan di Dewan Uni Eropa, menciptakan kondisi yang memungkinkan Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di Eropa, khususnya di Italia. Italia, sebagai salah satu negara kaya di Eropa yang terdampak signifikan oleh krisis keuangan, menjadi target strategis bagi Tiongkok untuk memperluas BRI dan mendapatkan akses ke pasar serta aset penting. Pergantian Presiden Dewan Uni Eropa yang sering terjadi memberikan peluang bagi Tiongkok untuk memanfaatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di Eropa guna memperkuat posisinya (Dell'Aguzzo, 2022). Di tahun 2014 Italia menjadi penerima aliran investasi mendadak dari Bank Rakyat Tiongkok, dimana Bank Rakyat Tiongkok ini mulai mengakuisisi dua persen perusahaan penting Italia dengan cara pembelian saham dan juga investasi langsung. Perusahaan-perusahaan Italia yang diakuisi Tiongkok yaitu ENI (*Ente Nazionale Idrocarburi*) adalah perusahaan energi multinasional yang bergerak dalam eksplorasi, produksi, dan distribusi minyak dan gas, serta terlibat dalam energi terbarukan. ENEL (*Ente Nazionale per l'Energia Elettrica*) adalah perusahaan listrik terbesar di Italia, yang mengoperasikan pembangkit listrik dan jaringan distribusi serta menyediakan energi listrik dan gas. FCA (*Fiat Chrysler Automobiles*) adalah grup otomotif yang memproduksi merek terkenal seperti Fiat, Chrysler, Jeep, dan Alfa Romeo. Telecom Italia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Italia yang menyediakan layanan telepon, seluler, dan internet. Generali adalah salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia, menawarkan layanan asuransi jiwa dan non-jiwa serta layanan keuangan dan Mediobanca adalah bank investasi yang menyediakan layanan perbankan investasi, perencanaan keuangan, dan manajemen aset (Pedisic, 2021).

Pada tahun 2015, niat Tiongkok untuk memperkenalkan Belt and Road Initiative (BRI) lebih dalam ke Eropa diumumkan melalui dua lembaga utama Tiongkok. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok, yang berperan dalam merumuskan strategi BRI, bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan

koordinasi proyek-proyek internasional terkait inisiatif tersebut. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Tiongkok membantu memfasilitasi investasi luar negeri, promosi perdagangan, dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara yang terlibat dalam BRI (Bhattarai, 2019). Inggris, Jerman, Prancis dan Italia adalah negara pertama yang bergabung dengan *Infrastructure Investment Bank* (AIIB), yaitu sebuah bank multilateral Tiongkok yang terkait erat dengan BRI karena merupakan salah satu bank terbesar milik Tiongkok yang mendanai proyek BRI (Fanny et al., 2019). Hal ini menandai awal penerimaan beberapa negara Eropa atas kontribusi Tiongkok terhadap pembangunan global khususnya negara Eropa bagian Selatan dan Timur. Yang paling penting bagi BRI di Eropa adalah Koridor Ekonomi Jembatan Darat Eurasia Baru dan Jalur Maritim. Koridor Ekonomi Jembatan Darat Eurasia Baru mencakup jaringan kereta api yang menghubungkan pabrik-pabrik di seluruh Eropa hingga ke London, berfungsi sebagai jalur ekspres yang mempercepat transportasi barang dan memperkuat konektivitas antara Asia dan Eropa. Jalur Maritim BRI melengkapi Koridor Ekonomi Jembatan Darat dengan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di Eropa dengan Asia, menyediakan jalur alternatif untuk pengiriman barang melalui laut. Jalur maritim ini memasuki Eropa melalui tenggara, menuju pelabuhan Piraeus di Yunani dan pelabuhan Trieste di Italia (Li, 2023).

Pelabuhan Piraeus, telah berhasil diakuisisi sebesar 67% oleh perusahaan pelayaran milik Tiongkok, yaitu *Cosco Shipping Ports* melalui investasi langsung dan pembelian saham. Akuisisi ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pada tahun 2008, *Cosco Shipping Ports* mendapatkan kontrak untuk mengelola dan mengoperasikan Terminal Kontainer di Pelabuhan Piraeus, yang memberi mereka hak eksklusif untuk mengelola dan mengembangkan terminal tersebut. Pada tahun 2016, Cosco membeli 51% saham Pelabuhan Piraeus dari PPA (*Piraeus Port Authority*) yaitu badan yang mengelola dan mengatur Pelabuhan Piraeus di Yunani. Pada tahun 2019, mereka menambah kepemilikan mereka menjadi 67%. Akuisisi ini dilakukan melalui pembelian saham yang diterbitkan oleh PPA. Setelah mendapatkan kepemilikan, Cosco melakukan investasi besar-besaran untuk memperbaiki pelabuhan, termasuk menambah kapasitas terminal, memperbarui

fasilitas dan teknologi, serta memperbaiki konektivitas pelabuhan dengan transportasi darat dan laut (Glass D, 2021).

B. Posisi strategis Italia bagi Tiongkok

Tiongkok memiliki alasan tersendiri dalam mendekati Italia. Negara ini memiliki makna simbolis bagi Tiongkok sebagai titik akhir Jalur Sutra Kuno. Masuknya Italia dalam proyek BRI sangat membantu Tiongkok dalam mempromosikan kebijakan andalan tersebut, yang dipersepsikan sebagai versi modern Jalur Sutra. Selain itu, kedua negara memiliki hubungan perdagangan maupun *people-to-people* yang cukup erat dan Italia adalah rumah bagi diaspora Tionghoa terbesar di Eropa (Reuters, 2023b). Tiongkok menganggap bergabungnya

Italia dalam BRI sebagai “kartu as” yang dapat dipakai untuk meningkatkan pengaruh di Eropa, dan dengan bergabungnya Italia dalam BRI dapat memicu ketidakselarasan atau ketidaksepakatan antara negara-negara anggota Uni Eropa dan juga antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat ini merupakan hal yang diinginkan Tiongkok dalam konteks strategi geopolitik. Dengan menciptakan perbedaan pendapat di antara negara-negara Uni Eropa, Tiongkok dapat memperlemah kebijakan kolektif Uni Eropa dan memudahkan Tiongkok untuk bernegosiasi dan menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara anggota secara individual. Ini memudahkan Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di Eropa tanpa harus menghadapi kebijakan bersama Uni Eropa. Ketidakselarasan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat bisa mengurangi kemampuan Barat untuk bekerja sama menghadapi kebijakan Tiongkok, tidak bisa menyatukan kekuatan mereka untuk merespons atau menekan kebijakan Tiongkok dengan efektif (Brinza et al., 2024).

Tiongkok berkeinginan untuk membuka jalur perdagangan melalui jalur laut atau yang disebut dengan *the 21st Century Maritime Silk Road* karena Italia memiliki Genoa dan Trieste yang merupakan pelabuhan penting bagi Tiongkok untuk melangsungkan perdagangan karena letaknya yang strategis. Letak strategis Italia yang berada di tengah-tengah jantung Mediterania mengakibatkan Tiongkok tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Italia, selain itu juga dikarenakan oleh rute dari jalur laut BRI Tiongkok berakhir di pelabuhan Venice milik Italia (Yang & Gattolin, 2023).

C. Italia bergabung dalam proyek BRI Tiongkok

Kerjasama Ekonomi atau kerjasama perdagangan antar negara menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk dilaksanakan setiap negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Kebutuhan disini dimaksud adalah adanya kepentingan nasional yang harus terpenuhi yang bisa membuat suatu negara mendapatkan hasil atau keuntungan dari kerjasama ekonomi atau perdagangan yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Italia sebagai negara maju memiliki kepentingan ekonomi terhadap Tiongkok setelah mengalami resesi tiga kali dalam dekade dan dampak dari COVID-19 yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Didukung lagi pada saat itu banyak warga Italia yang merasa diabaikan oleh Eropa, sementara pemerintah populis Italia bersikap skeptis terhadap Uni Eropa dan sangat ingin beralih ke Tiongkok. Dengan kondisi tersebut Italia melihat Tiongkok sebagai alternatif yang menarik untuk memenuhi kebutuhan investasinya (De Maio, 2020).

Pada Maret 2019, presiden Xi Jinping berkunjung ke Italia sekaligus untuk menandatangani isi dari perjanjian kerjasama perdagangan BRI tersebut dibuktikan dengan adanya MoU (*Memorandum of Understanding*) yang ditandatangani oleh perdana menteri Italia Giuseppe Conte (Andornino, 2023). Perjanjian tersebut berbeda dengan perjanjian-perjanjian lainnya, dimana perjanjian ini bersifat tidak mengikat kedua negara, tidak memiliki kekuatan hak dan kewajiban seperti perjanjian-perjanjian lainnya. Perjanjian ini tidak disusun sebagai perjanjian ekonomi atau perdagangan, melainkan menyatakan kesediaan umum untuk bekerja sama di bawah kerangka BRI (Reuters, 2023a).

Italia telah menjadi anggota *AIIB* bersama Prancis, Jerman sejak tahun 2016 dan salah satu pendiri Uni Eropa dan menjadi anggota G7. Italia menjadi anggota pertama G7 yang secara resmi bergabung dengan proyek raksasa yang prakarsai oleh Tiongkok, yang berarti mewakili tujuh negara dengan perekonomian paling maju di dunia yang menandatangani perjanjian MoU baru tentang kerja sama dalam BRI pada 23 Maret 2019. Penandatanganan tersebut dilakukan Italia tanpa berkonsultasi dengan mitra tradisionalnya yaitu Amerika Serikat (Esteban et al.,

2020). Dalam (MoU, 2019) menyatakan bahwa tujuan BRI adalah untuk mencapai sinergi antara BRI dan prioritas rencana investasi untuk Eropa dengan mengubah kekuatan saling melengkapi kedua negara menjadi keuntungan praktis dari kerja sama dan pertumbuhan berkelanjutan. Bergabungnya Italia kedalam kerjasama BRI dinilai menuai pro kontra baik secara internal maupun eksternal Italia. Namun Perdana Menteri Giuseppe Conte pada saat itu menegaskan bahwa Italia akan tetap bergabung dengan proyek tersebut (Bernd Riegert, 2022).

Perdana menteri Giuseppe Conte berharap akan mendapatkan keuntungan besar setelah terlibat dalam hubungan kerjasama BRI dengan Tiongkok. Italia dan Tiongkok memiliki kepentingan masing-masing dalam menjalin hubungan kerjasama BRI, disisi Italia dibawah pemerintahan Perdana Menteri Giuseppe Conte Italia ingin memperluas pasarnya. Luigi di Maio, Menteri Pembangunan Ekonomi Italia mengatakan tujuan Italia menandatangani MoU tersebut agar menyeimbangkan perdagangan antara Italia dan Tiongkok dengan meningkatkan ekspor produk Italia di Tiongkok ini akan membantu Italia mengatasi resesi ekonomi (Mitchell C, 2019). Di sisi lain yaitu Tiongkok mendapatkan keuntungan karena Italia mendukung proyek BRI. Tiongkok berharap Italia dapat menjembatani negara-negara Eropa lainnya untuk dapat bergabung ke dalam BRI dan memperluas proyek BRI nya di Eropa. Selain itu, lebih dekat Italia sebagai negara kekuatan menengah di wilayah Barat yang bersekutu dengan NATO (Park & Tong, 2023).

Tiongkok dan Italia berkomitmen untuk bekerja sama dalam memperkuat hubungan politik dan perdagangan, serta memajukan perdamaian regional. Bidang kerjasama yang direncanakan yaitu; 1) Investasi transportasi, logistik dan infrastruktur: seperti jalan raya, rel kereta api, jembatan, penerbangan sipil, pelabuhan, energi dan telekomunikasi 2) Di sektor energi, kedua negara berfokus pada pengembangan energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, dan biomassa. Perusahaan-perusahaan Italia, seperti Enel, telah menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mengembangkan proyek-proyek energi di berbagai negara. Italia memiliki keahlian dalam teknologi energi terbarukan yang dapat digunakan untuk mendukung inisiatif hijau Tiongkok dalam

BRI 3) Menghapus hambatan terhadap perdagangan dan investasi, mempromosikan kemitraan antara lembaga keuangan masing-masing 4) Konektivitas antar masyarakat, mendorong pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, pariwisata dan pendidikan 5) Kerjasama lingkungan, mengejar pembangunan berkelanjutan dan ekologis (Reuters, 2023b).

D. Analisis Keluarnya Italia dalam kerjasama BRI menggunakan Teori Faktor Internal dan Faktor Eksternal milik Richard Snyder

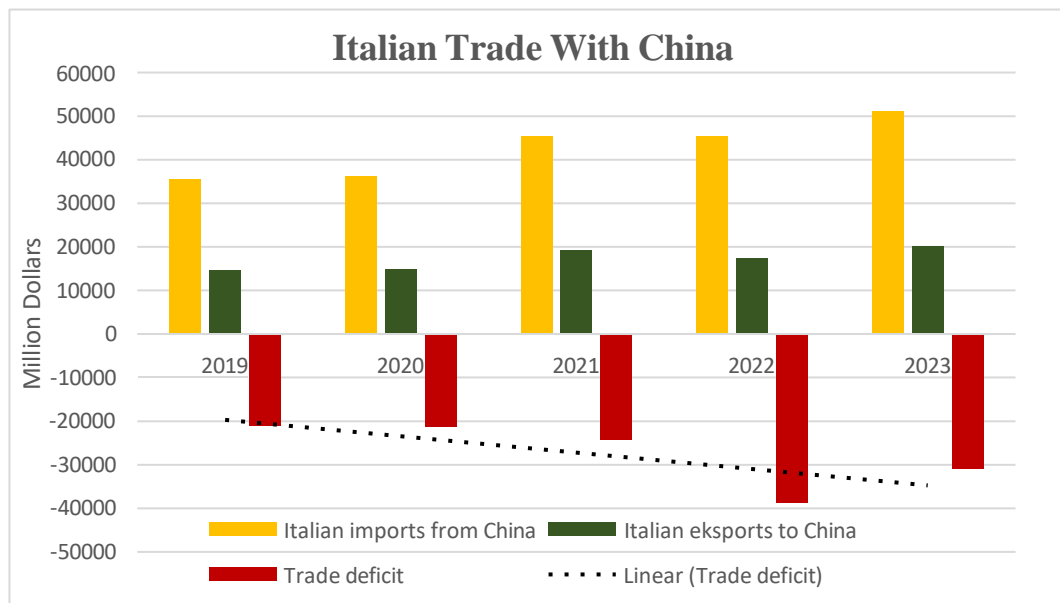
Pada tanggal 6 Desember 2023, pemerintah Italia secara resmi mengumumkan bahwa Italia tidak akan memperbarui MoU tahun 2019 mengenai partisipasi formalnya dalam BRI Tiongkok. Langkah ini secara efektif menarik Italia dari inisiatif diplomatik utama Presiden Xi Jinping. Keputusan Italia untuk keluar dari kerjasama BRI dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dianalisis menggunakan alat bantu teori faktor eksternal dan faktor internal milik Richard Snyder.

1 Internal Setting

a Faktor ekonomi

Salah satu tujuan penandatanganan MoU BRI oleh Italia adalah untuk menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan yang tidak seimbang antara Italia dengan Tiongkok (Bhattarai, 2019). Namun Menteri Luar Negeri Antonio Tajani mengatakan selama Italia berpartisipasi dalam kerjasama BRI Italia belum mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. BRI tidak dapat memenuhi ekspektasi Italia. Alih-alih mendapatkan keuntungan setelah bergabung dengan BRI, Italia malah mengalami defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok sebesar dua kali lipat dalam tiga tahun. Defisit perdagangan Italia dengan Tiongkok sebesar Defisit perdagangan Italia dengan Tiongkok sebesar 22,3 miliar euro (23,9 miliar Dollar) antara tahun 2019 dan 2022, menurut Kementerian Luar Negeri Italia (Joe Cash, 2023).

Gambar 2. Nilai perbandingan angka defisit Perdagangan Italia dengan Tiongkok, Nilai Import Italia dari Tiongkok, dan Nilai Ekspor Italia ke Tiongkok



(Sumber data : OEC World (2024) *Italy and China Trade*)

Italia mengalami defisit perdagangan karena tidak seimbangannya nilai ekspor dan impor antara Italia dan Tiongkok, Impor dari Tiongkok terus meningkat tanpa peningkatan yang setara dalam ekspor Italia ke Tiongkok. Lebih banyak produk Tiongkok yang masuk ke Italia dan terlalu sedikit produk Italia yang masuk ke Tiongkok artinya Italia lebih banyak membeli produk dari Tiongkok dibanding menjual produk Italia ke Tiongkok (Zhang, 2024). Sejak bergabung dengan BRI, ekspor Italia ke Tiongkok hanya meningkat dari 14,6 miliar dollar di tahun 2019 menjadi 17,4 miliar dollar pada tahun 2022, dan sempat meningkat menjadi 19,1 miliar dollar ditahun 2021 (OEC World, 2024). Pada tahun 2020 hingga 2022, defisit perdagangan Italia meningkat cukup signifikan karena meningkatnya impor Italia dari Tiongkok, yang sebagian besar dipicu oleh dampak COVID-19. Pandemi menyebabkan lonjakan permintaan Italia terhadap alat medis, seperti masker, alat pelindung diri, ventilator, dan alat tes, serta vaksin COVID-19 yang diproduksi di Tiongkok. Ketergantungan Italia pada impor alat medis dan vaksin ini

memperparah defisit perdagangan karena nilai impor melebihi nilai ekspor (Allione et al., 2021).

Pada tahun 2020 Italia mengimpor barang dari Tiongkok senilai sekitar 36,2 miliar dollar, pada tahun 2021 Italia mengimpor barang Tiongkok senilai 45,3 miliar dollar, pada tahun 2022 impor Italia dari Tiongkok senilai 45,3 miliar dollar. Pandemi tidak hanya meningkatkan permintaan untuk produk kesehatan tetapi juga memperlambat produksi domestik, sehingga memperburuk situasi ekonomi dan memperlebar kesenjangan perdagangan antara Italia dan Tiongkok (OEC World, 2024). Dari grafik ini, dapat dilihat bahwa impor Italia dari Tiongkok mengalami peningkatan signifikan dari 2019 hingga 2022, sementara ekspor Italia ke Tiongkok juga mengalami peningkatan tetapi dalam skala yang lebih kecil ditahun 2023 (Ambasciata d'Italia Pechino, 2024). Sebaliknya, Tiongkok lebih banyak melakukan perdagangan dengan negara-negara anggota UE lain, yaitu Prancis dan Jerman, meskipun dua negara dengan perekonomian terbesar di zona euro tersebut tidak bergabung dalam BRI (Yang & Gattolin, 2023).

Tiongkok adalah inisiator penggerak utama BRI, sehingga memiliki kontrol yang signifikan atas arah dan pelaksanaan proyek-proyek di bawah inisiatif ini. Seperti yang diketahui bahwa fokus BRI adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan baru, jalur kereta api, dan pelabuhan yang memfasilitasi transportasi barang dan manusia yang lebih efisien. Infrastruktur ini sangat mendukung peningkatan ekspor Tiongkok dengan memperlancar arus barang dari Tiongkok dan membuat impor barang Tiongkok lebih cepat dan murah (Amighni, 2019). Dalam perdagangan Internasional Tiongkok masih belum dianggap sebagai ekonomi pasar karena seringkali beroperasi dalam sistem non-timbal balik dibidang komersial dan dalam kerangka investasi dan juga melakukan aktivitas dumping dalam perdagangan keluar negeri yang merugikan ekonomi negara lain. Tiongkok melakukan perdagangan dengan menjual produk atau barang keluar negeri dengan jumlah yang banyak dan harga yang lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Contohnya Tiongkok sering melakukan ekspor sutera ke India dengan harga yang jauh lebih murah padahal India adalah negara penghasil sutera terbesar, sehingga

ini merugikan bagi perekonomian terutama perusahaan lokal yang memproduksi sutera di India (Zhang, 2024) .

Dalam kasus Italia seperti yang diketahui produk-produk Italia adalah produk-produk yang berkualitas tinggi seperti barang-barang mewah, fashion, dan produk-produk manufaktur yang sifatnya lebih spesifik. Sedangkan disisi lain produk-produk Tiongkok lebih bervariasi sesuai permintaan yang dibutuhkan konsumen, mulai dari elektronik, tekstil, barang pecah belah atau perkakas, hingga barang-barang konsumsi dengan biaya yang relatif rendah bahkan dibawah harga produksinya. Aktivitas dumping dalam konteks perdagangan internasional antara Tiongkok dan Italia mengacu pada praktik dimana Tiongkok mengekspor barang ke Italia dengan harga yang lebih rendah dari pada harga domestik atau biaya produksi. Tujuan dari praktik ini untuk memenangkan pangsa pasar di Italia, meskipun dapat merugikan produsen lokal Italia. Contohnya adalah barang elektronik dan Teknologi seperti komputer dan lain-lain yang diproduksi dari Tiongkok seringkali dijual dengan harga lebih rendah daripada produk serupa yang diproduksi Italia, sehingga banyak konsumen Italia yang lebih tertarik dengan produk Tiongkok (Zhang, 2024).

Hubungan transportasi yang lebih erat dan lebih baik dengan Tiongkok nyatanya mengakibatkan neraca perdagangan yang lebih tidak seimbang karena dibawah kontrol Tiongkok atas inistif BRI. Banyak negara sepanjang jalur sutra (terutama di Asia Tengah) mengalami defisit perdagangan dengan Tiongkok. Perdagangan antara Tiongkok dengan lima negara Asia tengah yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan nilai impor dari Tiongkok meningkat dan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan ekspor dari negara-negara tersebut, sehingga kawasan ini mengalami defisit perdagangan dengan Tiongkok yang semakin besar. Defisit perdagangan Italia dengan Tiongkok disebabkan adanya kebijakan perdagangan yang mendukung ekspor Tiongkok. Tiongkok memiliki posisi yang dominan dalam BRI karena perannya sebagai inisiator penggerak utama yang menjadikan BRI sebagai alat diplomasi ekonomi untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara peserta khususnya Italia

yang pada gilirannya meningkatkan pengaruhnya di tingkat Internasional (Xiao, 2023).

Kekhawatiran Italia terhadap Hak Kekayaan Intelektual juga menjadi suatu alasan Italia untuk memikirkan kembali dampak jangka panjang dari BRI bagi perekonomian Italia. Tiongkok terkenal dengan memproduksi barang tiruan. Menurut data OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), sumber utama produk palsu yang disita oleh bea cukai Italia adalah berasal dari Tiongkok. Tiongkok merupakan sumber utama barang palsu dan bajakan yang melanggar hak kekayaan intelektual Italia, oleh karena itu, muncul ketakutan bahwa dengan BRI, sejumlah besar barang palsu akan dipasok dari Tiongkok ke Italia. Produk yang paling terkena dampak fenomena pemalsuan adalah produk-produk asli Italia seperti barang mewah, mesin, peralatan listrik, dan produk tembakau. Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi merek Italia yang nilainya diakui di seluruh dunia berkat kualitas dan pengetahuan di balik produk ekspor Italia (Bandini, 2019).

Di Italia, sebagian besar perekonomiannya bertumpu pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tetapi mereka tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari pelanggaran, seperti manufaktur berkualitas rendah yang tidak menggunakan merek dengan benar. Ketika jumlah barang palsu meningkat, perekonomian Italia akan sangat menderita, dan dunia usaha berada dalam bahaya. Label produk Italia berkualitas tinggi sangat memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan di pasar Italia dan meningkatkan reputasi Italia di mata dunia. Jika label ini dirusak oleh barang palsu, kepercayaan konsumen dan pemasok akan menurun. Hak kekayaan intelektual merupakan bidang yang penting bagi bisnis Italia dan merupakan faktor penentu dalam menentukan daya saing, terutama bagi merek dan produsen barang lokal Italia. Memberi Tiongkok kekuasaan atas Italia kemungkinan besar akan menyebabkan lebih banyak barang palsu serta pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh Tiongkok. Oleh karena itu, BRI merupakan ancaman terhadap sistem keamanan kekayaan intelektual di Italia. Label produk asli Italia yang berkualitas tinggi adalah aspek kunci dalam menghasilkan keuntungan di Italia dan

memiliki daya tarik internasional yang besar. Hilangnya aset semacam itu bagi perekonomian Italia akan sangat merugikan. Bagi pemerintah Italia, dampak utama perdagangan global produk palsu dan bajakan yang melanggar merek dagang dan paten Italia adalah hilangnya pendapatan pajak, rendahnya volume penjualan dan keuntungan yang dihasilkan oleh pemegang hak cipta di Italia secara langsung mengurangi pajak penghasilan perusahaan, hilangnya lapangan kerja di sektor manufaktur akibat pemalsuan akan mengurangi pajak gaji (Bandini, 2019).

Defisit neraca perdagangan bukan satu-satunya kekecewaan Italia. Prospek investasi dari Tiongkok yang digadang-gadang dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi pada kenyataannya masih jauh dari harapan (Amighini & Herrero, 2023a). Sementara itu, menurut data Green Finance and Development Center di Universitas Fudan investasi terkait Investasi langsung /*foreign direct investment* Tiongkok di Italia turun dari 2,51 miliar euro pada tahun 2019 menjadi hanya 810 miliar euro pada tahun 2021, jauh di bawah nilai investasi langsung Tiongkok di negara-negara Uni Eropa non-anggota BRI. Dalam hal infrastruktur seperti beberapa proyek pelabuhan yaitu pelabuhan Trieste dan pelabuhan Genoa di Italia mengalami kendala dan perlambatan sehingga tidak memenuhi ekpektasi Italia (Yang & Gattolin, 2023).

Meskipun BRI awalnya dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan infrastruktur dan investasi, seiring waktu muncul keraguan dan kekecewaan Italia terhadap kurangnya realisasi investasi BRI Tiongkok mencerminkan ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan dalam kerjasama ekonomi ini. Italia merasa bahwa manfaat yang dijanjikan dari BRI tidak sebanding dengan risiko dan investasi yang diharapkan dari pihak Tiongkok. Terpilihnya Giorgia Meloni sebagai perdana menteri Italia menimbulkan tantangan besar bagi Italia untuk tetap menjadi anggota BRI. Hal ini disebabkan oleh ambisi Meloni untuk menyelaraskan kembali Italia dengan Amerika Serikat, dan membatalkan apa yang dilakukan oleh partai M5S (*Movimento 5 Stelle*) yang dipimpin oleh Giuseppe Conte dalam hubungan kerjasama BRI dengan Tiongkok yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi (Andornino, 2022).

b. Faktor politik Internal

Dinamika perubahan politik internal juga mencoba untuk menjelaskan adanya pengaruh yang menyebabkan Italia menolak atau keluar dari kerjasama BRI yang diinisiasi oleh Tiongkok. Italia bergabung kedalam kerjasama BRI pada tahun 2019, dan Italia memutuskan menarik diri dari BRI pada akhir tahun 2023. Pandangan terhadap BRI di Italia telah berubah seiring waktu, terutama setelah pergantian pemerintahan. Dalam rentang tahun 2019 sampai 2023 Italia telah mengalami pergantian kepala pemerintahan atau Perdana Menteri sebanyak tiga kali. Hal ini disebabkan adanya konflik internal politik yang terjadi di Italia karena adanya kepentingan atau tujuan politis dari kelompok-kelompok partai (Castiglioni & Soula, 2022) .

Pada tahun 2018 koalisi partai besar mendominasi dan memiliki suara terbanyak yaitu partai M5S (*Movimento 5 Stelle*) yang merupakan partai populis yang berhaluan sayap kiri, dan Partai LSP (*League for Salvini Premier*) yang merupakan partai konservatif berhaluan sayap kanan. Sayap kiri identik dengan nilai-nilai kebebasan, idealis, persamaan derajat, solidaritas, reformasi, dan internasionalisme. Partai sayap kiri cenderung mendukung kebebasan ekonomi, keadilan sosial, dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk Tiongkok. Sementara itu, sayap kanan identik dengan ide-ide hierarki, tradisi, nasionalisme, dan kritis dalam pengambilan kebijakan luar negeri (Varriale, 2021)

Meskipun berkoalisi kedua Partai ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap BRI Tiongkok. Partai sayap kiri Partai M5S melihat proyek tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan konektivitas dan kemajuan ekonomi Italia dan hanya berfokus pada Tiongkok. Sementara itu Partai sayap kanan memiliki hubungan yang kompleks dengan Rusia. Ini menunjukkan strategi hedging Italia, yaitu cara Italia mencoba menjaga keseimbangan dan fleksibilitas dalam berhubungan dengan berbagai kekuatan dunia. Strategi hedging dalam politik internasional berarti suatu negara berusaha untuk tetap memiliki banyak pilihan dan tidak terlalu terikat pada satu pihak saja. Namun, partai Liga memiliki pandangan

yang lebih kritis terhadap BRI, melihat proyek tersebut sebagai upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya secara global (Nadalutti & Rüländ, 2024).

Pada tahun 2019 Pada saat Giuseppe Conte menjadi Perdana Menteri yang berasal dari partai M5S berhaluan sayap kiri, memutuskan untuk menandatangani keikutsertaan Italia dalam BRI. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu, pemerintah Italia yang dipimpin oleh Conte yang idealis melihat potensi dan manfaat dari inisiatif tersebut. Dalam hal ini Italia juga ingin mengurangi ketergantungan pada Eropa dengan memperkuat hubungan dengan pemain eksternal utama yaitu Tiongkok, ini juga bertujuan untuk konsumsi politik domestik, untuk menghindari kesan pemerintah yang terisolasi dalam politik Internasional. Partai M5S yang dipimpin oleh Conte memandang partisipasi dalam BRI sebagai solusi terhadap tantangan ekonomi Italia (Decode39, 2023).

Pada tahun 2021, Giuseppe Conte mengundurkan diri jabatannya sebagai Perdana Menteri karena frustrasi dengan penanganan pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Pengunduran dirinya menjerumuskan Italia ke dalam ketidakpastian politik di tengah pandemi yang telah menewaskan lebih dari 80.000 orang yang merupakan angka kematian tahunan tertinggi sejak Perang Dunia II (Robert, 2021), sehingga membuat kepala negara Sergio Mattarella segera mengadakan putaran diskusi dengan para pemimpin partai dan mengadakan pemilu. Giuseppe Conte resmi digantikan oleh Mario Draghi yang merupakan mantan presiden Bank sentral Eropa yang dikenal dengan kebijakan moneter yang konservatif dan stabilitas yang kuat, yang seringkali dianggap sebagai pendekatan yang lebih condong ke sayap kanan dalam politik ekonomi, namun ia tidak terikat ke partai politik tertentu sehingga tidak dapat dikategorikan secara khusus kedalam sayap kiri atau kanan. Mario Draghi membentuk koalisi persatuan nasional yang didukung oleh Partai Demokrat berhaluan kiri-tengah, partai Liga sayap kanan, partai M5S sayap kiri dan partai Forza Italia yang konservatif, dan partai FDI (*Fratelli d'Italia*) berhaluan sayap kanan esktrim, yang dipimpin Giorgia Meloni adalah satu satunya partai yang tidak ikut bergabung (Nadalutti & Rüländ, 2024).

Dalam kebijakannya Mario Draghi mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap Tiongkok. Pemerintah Draghi mengambil tindakan memperluas Kebijakan *Golden Power* atau kekuatan emas yaitu kekuasaan khusus untuk melindungi aset dan perusahaan nasional yang relevan secara strategis dari campur tangan asing yang tidak semestinya dengan membatasi proyek BRI di Italia termasuk memblokir upaya Tiongkok untuk memperoleh kepentingan dalam otoritas pelabuhan di Genoa dan pelabuhan lainnya. Draghi juga menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap investasi asing dalam sektor ekonomi yang relevan dengan keamanan, seperti teknologi, dan telekomunikasi 5G (Elisabetta, 2024).

Pada tahun 2022 Mario Draghi mengundurkan diri dari jabatannya karena hilangnya dukungan dari partai M5S dan Partai Liga, memicu terjadinya pemilihan umum yang cepat lagi. Kelompok sayap kanan Partai FDI yang dipimpin Giorgia Meloni memimpin pemilu dan mendominasi sebagian besar liputan pemilu. Partai ini hanya memperoleh suara 4% pada pemilu terakhir, namun mendapat keuntungan karena menjadi partai terbesar yang tidak bergabung dengan pemerintahan Draghi menjadikannya partai oposisi yang menonjol (Reland, 2022). Partai FDI adalah partai berhaluan sayap kanan yang dipimpin Giorgia Meloni yang dilantik tahun 2022 sebagai Perdana Menteri Italia yang baru. Di pemerintahannya Meloni menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap kebijakan luar negeri, termasuk hubungan dengan negara-negara lain seperti Tiongkok (Zeneli, 2023a). Meloni melihat hubungan Italia dengan Tiongkok dalam BRI adalah sia-sia. Dalam hal kebijakan luar negeri, Giorgia Meloni lebih condong dan dekat dengan Biden, pro NATO, dukungan kuat terhadap Ukraina atas invasi Rusia, peningkatan hubungan dengan Taiwan, dan sikap kritis terhadap represi Tiongkok di Hong Kong dan Xinjiang dan condong mengambil sikap anti Tiongkok. Meloni juga meningkatkan hubungan Italia dengan India sebagai alternatif BRI (Zeneli, 2023b).

Selama kampanye pemilu terakhir Italia pada musim panas 2022, Meloni mengatakan bahwa kepatuhan negara tersebut terhadap BRI adalah sebuah 'kesalahan'. Menteri Pertahanan Guido Crosetto (Coratella, 2023) mengatakan

bahwa perjanjian antara kedua negara, akan berakhir pada tahun 2023. Pada 21 April 2023, sebagai Perdana Menteri Italia yang baru, Meloni mengonfirmasi bahwa Italia berniat keluar dari BRI (Amighini & Herrero, 2023b). Meloni memang menunjukkan sikap skeptis terhadap BRI, namun dalam pengunduran diri Italia dari BRI dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari retaliasi dari Tiongkok, dan juga menunjukkan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Tiongkok meskipun tidak menjadi anggota BRI (Chrispian, 2023).

2. Eksternal Setting

a. Geopolitik

Hal yang menjadi sorotan adalah Italia menjadi negara pertama dari kelompok G7 yang mendukung adanya proyek BRI yang mana hal tersebut dilihat oleh beberapa pihak sebagai tindakan yang menentang terhadap Uni Eropa. Seperti yang diketahui Italia adalah salah satu negara yang masuk kedalam Uni Eropa. Kebijakan Italia dalam penandatanganan kerjasama BRI menuai respon dan membuat geram Uni Eropa dan beberapa tokoh yang pro Uni Eropa, seperti Emmanuel Macron yang menganggap Italia turut membantu salah satu saingan utama ekonomi Uni Eropa (Miner & Matamoros, 2019). Tiongkok terus-menerus menyatakan bahwa BRI merupakan situasi “*win-win*” bagi Tiongkok dan negara-negara dimana mereka berinvestasi. Meskipun demikian, kerjasama ekonomi mempunyai pengaruh bagi politik (Brattberg E, 2018).

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan mengenai perubahan kebijakan Italia untuk keluar dari kerjasama BRI dengan Tiongkok tersebut, kontribusi yang paling memberikan pengaruh besar bagi kebijakan luar negeri Italia adalah berupa adanya tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Merambatnya BRI ke lingkup Eropa khususnya Italia menjadi tantangan dan kekhawatiran tersendiri bagi Uni Eropa dan Amerika Serikat. Uni Eropa melarang Italia untuk bergabung dengan kerjasama proyek Tiongkok yang mana dikhawatirkan akan memperkuat ekspansi politik-ekonomi Tiongkok di kawasan Uni Eropa (Miner & Matamoros, 2019).

UE menyadari investasi BRI di Eropa bukanlah situasi yang “*win-win*” seperti yang dikatakan Tiongkok, Uni Eropa semakin skeptis terhadap motif Tiongkok khususnya dengan meningkatnya utang di negara-negara Eropa Selatan dan Timur sebagai akibat dari Proyek BRI (Lukasz K, 2002). Sebagaimana Amerika Serikat sebagai mitra tradisional Italia yang konsisten mengkritik dan mengecam Proyek BRI yang diperkirakan menghabiskan triliyun dan memperingatkan tentang resiko “Diplomasi Jebakan Utang” seperti yang dikatakan oleh juru bicara Gedung Putih Garret Marquis memandang bahwa BRI diciptakan oleh Tiongkok dan untuk Tiongkok. Menurut Marquis mendukung BRI memberikan legitimasi pada pendekatan Tiongkok yang dinilai ‘ganas’ dalam berinvestasi dan tidak akan membawa manfaat apapun bagi Italia. Amerika Serikat secara konsisten menyatakan bahwa Tiongkok menciptakan perangkap utang melalui proyek infrastruktur predator untuk memperbesar pengaruh politiknya di negara-negara penerima bantuan (Mark A, 2024).

Dengan utang publik yang melebihi 130 persen dari PDB (produk domestik bruto), mitra tradisional Italia Uni Eropa dan Amerika Serikat memandang Italia sangat rentan terhadap risiko setelah menjadi bagian dari BRI. Selain itu menganggap skema BRI tidak membantu Italia dalam sektor ekonomi dan disisi lain hal tersebut merusak citra Italia sendiri. Pada dasarnya setiap negara Barat menentang proyek BRI Tiongkok karena menganggapnya sebagai upaya pemerintah Tiongkok untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya di dunia dan potensi kehilangan kedaulatan negara-negara peserta yang ikut BRI. Perjuangan Sri Lanka, Maladewa dan Malaysia dalam membayar kembali pinjaman adalah contoh yang patut dicatat. Perekonomian Italia yang lesu, dibebani dengan rasio utang terhadap PDB lebih dari 130% berisiko terkena dampak serupa. Dengan jumlah utang yang besar, Tiongkok akan mampu memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan-perusahaan dan teknologi sensitif Italia contohnya perusahaan Tiongkok yaitu Cosco shipping telah berhasil mengakuisisi sepenuhnya pelabuhan Pireus milik Yunani yaitu pelabuhan terpenting dan terbesar di Eropa (Mazocco, 2023).

Meskipun keputusan Italia bergabung dalam BRI dipengaruhi oleh faktor domestik yaitu kebutuhan investasi akibat pertumbuhan ekonomi Italia yang tidak stabil, kritik Amerika Serikat yang terus-menerus terhadap BRI mendorong Italia untuk mengambil sikap serupa. Amerika Serikat melalui saluran diplomatik dan pernyataan publik, telah secara aktif mencegah negara-negara lain untuk bergabung ke dalam BRI dan menarik diri Italia dari kerjasama BRI sebagai tanda adanya tekanan dari mitra tradisional yaitu AS. Hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok adalah rivalitas yang telah lama berselisih karena ketegangan perang dagang. Amerika Serikat khawatir dengan memberikan Tiongkok akses menuju Italia yang mana Italia adalah aset keamanan terbesar bagi Amerika Serikat, dikawasan tersebut penuh dengan pangkalan-pangkalan NATO dan dirasa sangat penting untuk menjaga keseimbangan geopolitik yang rapuh di kawasan Mediterania, yang akan menjadi langkah beresiko dan berbahaya yang dapat meningkatkan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Selama terlibat dalam kerjasama BRI dengan Tiongkok, hubungan Italia dengan mitra tradisionalnya mengalami ketegangan, dan dapat mengancam keamanan Italia (Zeneli, 2023). Keputusan Italia menarik diri dari kerjasama BRI dengan Tiongkok menegaskan keselarasan Italia dengan sikap transatlantik terhadap Tiongkok. Sikap Transatlantik merupakan kebijakan dan pandangan yang berorientasi pada hubungan dan kerjasama antara Eropa dan Amerika Utara, khususnya Amerika Serikat. Italia menyelaraskan kebijakannya dengan posisi yang sering diambil oleh negara-negara Barat, terutama yang merupakan anggota NATO atau Uni Eropa, dalam menghadapi pengaruh Tiongkok. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Italia mungkin lebih fokus pada hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, yang dikenal sebagai aliansi Euro-Atlantik, dan mengutamakan kerjasama dengan mereka dibandingkan dengan Tiongkok (Trian, 2021).

Keputusan Italia untuk menyelaraskan diri dengan kepentingan Amerika Serikat berasal dari keinginan Giorgia Meloni untuk memperkuat kemitraan Italia dengan mitra tradisionalnya (AS, UE, G7, NATO). Meloni telah menyatakan dengan jelas bahwa Italia akan tetap berkomitmen pada pilar Uni Eropa dan Barat

melawan pemerintah otokratis seperti Rusia dan Tiongkok. Meloni berambisi untuk menyelaraskan kembali Italia dengan Amerika Serikat, dan membatalkan apa yang dilakukan oleh partai M5S yang dipimpin oleh Giuseppe Conte dalam hubungan kerjasama BRI dengan Tiongkok yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi (Castiglioni & Soula, 2022). Keputusan penarikan diri juga demi kepentingan pemerintahan Meloni yang lebih luas, peluang bagi pemerintah untuk bersekutu secara lebih terbuka dengan Amerika Serikat dan menandakan posisi Italia sebagai sekutu kuat Amerika Serikat dan NATO pada saat ketegangan ekonomi, keamanan, dan politik sedang mengubah perdagangan, investasi, dan rantai pasokan internasional (Tocci & Goretti, 2023). Kebijakan Italia dalam menandatangani kerjasama BRI dengan Tiongkok adalah kepentingan jangka pendek yang tidak melihat dampak jangka panjang. Pengalaman Italia dalam berhubungan dengan Tiongkok memperlihatkan pentingnya setiap negara mengedepankan dinamika dengan mitra tradisional yang akan membawa dampak yang lebih berkelanjutan, alih-alih menekankan pertimbangan pada kepentingan sesaat (Chrispian, 2023) .